

Fasilitasi Penyusunan Panduan Penerapan Sustainable Production and Consumption (SPC) Sektor Ekonomi Sirkular di wilayah Riau

¹Riyadi Mustofa, ²Riati Bakce, ³Nefrida, ⁴Mar'aini

Progran Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Bunda Indonesia

¹riyadi.mustofa@upbi.ac.id, ²riati@upbi.ac.id, ³nefrida@upbi.ac.id, ⁴maraini135@gmail.com

Submit : 19 Mar 2026 | Diterima : 02 April 2026 | Terbit : 05 April 2026

ABSTRAK

Fasilitasi Penyusunan Panduan Penerapan Sustainable Production and Consumption (SPC) Sektor Ekonomi Sirkular di Koridor Riau, Jambi dan Sumatera Barat (RIMBA) sebagai Implementasi Strategi melalui Ekosistem Ekonomi Sirkular untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui failitasi ini diharapkan Penerapan SPC di sektor Ekonomi Sirkular diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, meminimalisir limbah dari kegiatan budidaya perkebunan, upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan ini sebagai salah satu Tridharma Perguruan Tinggi melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan United Nations Environmental Programme (UNEP), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dan Universitas Persada Bunda Indonesia. Buku Panduan Penerapan SPC Sektor Ekonomi Sirkular diharapkan menjadi salah satu referensi praktis dan strategis dalam memperkuat tata kelola ekonomi sirkular dalam rangka mendukung pembangunan perkebuna kelapa sawit khususnya sawit rakyat secara berkelanjutan. Urgensi Penyusunan Panduan SPS Ekonomi Sirkular di Koridor RIMBA telah terjadinya pragmentasi kawasan konservasi, upaya perlindungan flora dan fauna khas, dan perlindungan tata air. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektor dan penolakan oleh masyarakat akibat kurangnya edukasi. Implementasi strategi SPC di kawasan Koridor RIMBA menjadi model dalam menyatukan dalam pelestarian alam dan peningkatan , peningkatan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Kelapa Sawit, Kesejahteraan Masyarakat, Konsumsi, Produksi.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan berkelanjutan. Jika salah satu sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan mengancam dan berdampak buruk apda sistem perekonomian. Jika terjadi kerusakan, negara menanggung biaya tinggi akibat tingkat produktivitas sumber daya alam yang semakin berkurang dan juga kualitas sumber daya manusia yang menurun akibat buruknya kesehatan karena polusi. Kerusakan tanah,sumber-sumber air, dan hutan-hutan yang diakibatkan oleh proses produksi yang kurang terencana serta tidak efisien jelas dapat mengurangi tingkat produktivitas nasional, terutama untuk jangka panjang. Namun hal tersebut sering luput dari perhitungan demi menghitung PDB menguntungkan. (Salim, 2010).

Ekonomi Hijau merupakan paradigma pembangunan yang didasarkan pada pendekatan efisiensi sumber daya dengan penekanan kuat pada internalisasi biaya penipisan sumber daya alam (*cost of natural resource depletion*) terhadap degradasi lingkungan, upaya untuk meringankan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nugraha et al., 2024). Ekonomi Hijau mencakup investasi pada energi terbarukan serta penekanan pada efisiensi energi guna menciptakan lapangan kerja dan meminimalisir emisi gas rumah kaca. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa pola produksi dan konsumsi saat ini tidak lagi berkelanjutan, sehingga diperlukan transformasi drastif demi mencegah kerusakan ekosistem global. Gagasan ini melahirkan

prinsip seperti degrowth pengurangan output ekonomi secara sengaja demi kelestarian alam serta modernisasi ekologis yang mengedepankan industri bersih sebagai motor kemajuan sosial. Selain itu, sektor ini juga mendorong terciptanya Green Jobs atau peluang kerja baru berbasis lingkungan dalam pembangunan (Wahyu Firdaus et al., 2023).

Pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumatera saat ini berada pada titik nadir yang krusial, di mana keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian ekosistem memerlukan intervensi kebijakan yang sangat presisi. Koridor Ekosistem RIMBA, yang merupakan akronim dari bentang alam Riau, Jambi, dan Sumatera Barat, muncul sebagai manifestasi dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyinkronkan penataan ruang dengan prinsip ekonomi hijau (Kustiawan, 1997). Kawasan seluas kurang lebih 3,8 juta hektar ini mengintegrasikan beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, mencakup Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung Bukit Batabuh, serta lanskap Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh (Pemerintah Provinsi Riau, 2018). Strategi utama yang diusung dalam pengelolaan koridor ini adalah penerapan Sustainable Production and Consumption (SPC) pada sektor ekonomi sirkular, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan antara pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan hidup (Nugraha et al., 2024).

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip sirkularitas dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (Junaidi, 2015). Model ini mengubah paradigma ekonomi linear tradisional yang berbasis pada pola "ambil-pakai-buang" menjadi sistem regeneratif. Implementasi ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan pada tiga kebijakan utama: penurunan penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk, serta daur ulang sisa produksi dan konsumsi (Nugraha et al., 2024).

Ekonomi sirkular merupakan sebuah konsep dimana produsen dan konsumen menggunakan suatu sumber daya secara berulang untuk memaksimalkan nilai gunanya sehingga terpakai secara efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan konsep ekonomi sirkular dalam model bisnis berkelanjutan untuk membangun gaya hidup hijau masyarakat Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi literasi. Hasil dari penelitian ini adalah ekonomi sirkular dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir kerusakan sosial maupun lingkungan, serta dapat membangun gaya hidup hijau masyarakat Indonesia (Wahyu Firdaus et al., 2023).

Urgensi penerapan SPC di wilayah RIMBA didorong oleh fakta bahwa kawasan ini menghadapi tekanan fragmentasi lahan yang masif. Data menunjukkan bahwa lebih dari 66 persen wilayah Koridor RIMBA telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, yang secara langsung berkontribusi pada ketidaksesuaian fungsi kawasan seluas 701.000 hektar. Selain itu, deforestasi lahan gambut di periode 1990-2022 telah mencapai 52 persen atau sekitar 264.000. (Widodo, 2017). Dalam konteks persampahan, wilayah ini menghasilkan timbunan sampah mencapai 1.534,62 ton per hari, di mana sekitar 30 persen memiliki nilai ekonomi potensial (Atharinafi & Wijaya, 2021). Transformasi sampah dari beban ekologis menjadi sumber daya sekunder melalui model ekonomi sirkular merupakan fondasi bagi pembangunan rendah karbon yang inklusif di Sumatera Tengah. Tujuannya untuk memutus rantai ketergantungan antara pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan hidup. (Mustofa et al., 2024).

Indikator keberhasilan program tersebut yaitu:

1. Efisiensi pengelolaan sumber daya alam agar tidak melakukan konversi dan alih fungsi lahan;
2. Meminimalisir limbah dari kegiatan budidaya perkebunan;
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui intensifikasi; dan
4. Tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Implementasi strategi *Sustainable Productive Landscapes* (SPC) di Koridor RIMBA menggunakan metode Penelitian Tindakan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Action Research*). Program ini diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan UNEP-GEF serta melibatkan akademisi dan pemerintah daerah melalui prinsip *collaborative governance*. Metode pelaksanaan pengabdian mencakup beberapa tahapan strategis yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan program dijalankan melalui empat tahapan strategis untuk menjamin keberlanjutan yaitu:

1. Pemetaan Komprehensif: Survei limbah dan identifikasi aktor pengelola sampah di seluruh wilayah koridor;
2. Penguatan Kapasitas: Pelatihan teknis pemilahan sampah, pengomposan, dan digitalisasi manajemen bank sampah;
3. Sinergi Strategis: Memfasilitasi kerja sama formal (PKS) antara bank sampah komunitas dengan industri daur ulang;
4. Pengawasan Terukur: Evaluasi berkala menggunakan indikator pengurangan limbah dan peningkatan kesejahteraan.

Pelaksanaan prinsip ekonomi hijau berjalan sesuai harapan, berbagai hambatan dan kendala dihadapi dalam menerapkan perekonomian hijau, seperti perubahan perilaku konsumen, resistensi sektor industri, dan kebijakan pemerintah yang belum mendukung salah satunya adalah tingkat pendidikan dan harga barang. Kesadaran dan pendidikan terhadap penerimaan produk dan layanan yang ramah lingkungan tergantung pada sejauh mana konsumen memahami isu-isu lingkungan. Kurangnya kesadaran atau pemahaman dapat menghambat adopsi produk hijau. Harga dan Ketersediaan: Produk ekonomi hijau cenderung memiliki biaya produksi yang lebih tinggi, yang dapat membuatnya lebih mahal. Jika konsumen tidak melihat manfaat lingkungan sebanding dengan biaya tambahan, mereka mungkin enggan beralih ke produk yang lebih berkelanjutan (Nugraha et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Detail program

Program ini dibangun Melalui pendekatan Sustainable Productive Landscapes (SPC), program ini memastikan produktivitas perkebunan tetap tinggi tanpa merusak ekosistem di Koridor RIMBA. Capaian pada aspek ini difokuskan pada optimalisasi lahan yang sudah ada guna menghindari ekspansi ke kawasan hutan dengan cara menahan penurunan laju konversi lahan hutan menjadi perkebunan melalui penguatan tata ruang nasional (Mustofa et al., 2025). Rencana strategis yang dijalankan yaitu dengan implementasi kebijakan tata ruang yang mengunci kawasan lindung di Koridor RIMBA agar tidak beralih fungsi untuk menjaga stabilitas ekosistem koridor tetap terjaga sambil tetap mempertahankan luas area produksi eksisting.

Penerapan SPC di sektor ekonomi sirkular pada wilayah RIMBA telah menghasilkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya. Hasil kegiatan ini dijabarkan melalui empat aspek utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan program yaitu:

1. Efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Pencegahan alih fungsi lahan dilakukan melalui integrasi tiga instrumen utama berupa Integrasi Tata Ruang Nasional: Menyelaraskan izin pemanfaatan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan Koridor RIMBA tetap berfungsi sebagai koridor ekologi. Kesesuaian tata ruang sebagai input dalam rangka meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan input pertanian yang lebih baik, sehingga kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa menambah luasan lahan yang dilakukan monitoring menggunakan data satelit dan verifikasi lapangan untuk memantau perubahan tutupan lahan secara real-time.
2. Meminimalisir limbah dari kegiatan budidaya perkebunan. Pemanfaatan sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) mulai dipertimbangkan sebagai strategi untuk menyerap residu sampah yang tidak bernilai daur ulang tinggi namun memiliki nilai kalori tinggi. Implementasi teknologi ini di wilayah RIMBA diharapkan mampu berkontribusi pada target nasional yaitu Indonesia bebas sampah 2029. Daur ulang sampah di perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi dan sumber energi;
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui intensifikasi (Luthfi et al., 2011). Telah terjadi perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Koridor RIMBA memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat melalui aktivitas bank sampah. Bank sampah bukan hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah, melainkan juga sebagai lembaga ekonomi mikro yang memberikan nilai tambah pada limbah. Studi kasus di Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi sirkular syariah melalui bank sampah telah

meningkatkan pendapatan keluarga nasabah antara Rp80.000 hingga Rp120.000 per bulan.16 Meskipun angka ini bersifat tambahan, namun kontribusinya mencapai lebih dari 10 persen dari total pendapatan bulanan keluarga di wilayah perdesaan, yang secara signifikan membantu daya beli masyarakat;

4. Tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tata kelola sawit adalah rangkaian sistem, kebijakan, dan praktik yang mengatur seluruh rantai nilai industri kelapa sawit mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, pengelolaan kebun, pengolahan pabrik, hingga pemasaran produk turunannya mencakup tiga pilar utama yaitu aspek legalitas dan perizinan, standar sertifikasi berkelanjutan, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan industri ini berjalan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal tanpa mengesampingkan aspek sosial dan kelestarian lingkungan

Keberhasilan program

Melalui pendekatan Sustainable Productive Landscapes (SPC), program ini memastikan produktivitas perkebunan tetap tinggi tanpa merusak ekosistem di Koridor RIMBA sebagai berikut:

Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pencegahan Alih Fungsi Lahan).

Capaian: Penurunan laju konversi lahan hutan menjadi perkebunan melalui penguatan tata ruang nasional.

Indikator Keberhasilan:

- a. Aksi Strategis: Implementasi kebijakan tata ruang yang mengunci kawasan lindung di Koridor RIMBA agar tidak beralih fungsi.
- b. Hasil: Stabilitas ekosistem koridor tetap terjaga sambil tetap mempertahankan luas area produksi eksisting.

Meminimalisir limbah dari kegiatan budidaya perkebunan

Meminimalisir limbah dengan cara mengubah limbah perkebunan dari beban lingkungan menjadi aset ekonomi melalui prinsip 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*).

Capaian: Target pengurangan limbah sebesar 20% melalui penggunaan kembali dan 15% melalui daur ulang.

Indikator Keberhasilan:

- a. Inovasi: Pengolahan limbah kopi dan sisa perkebunan menjadi pupuk organik berkualitas di wilayah Gunung Kerinci.
- b. Pemanfaatan limbah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) dan energi biogas (Unit Sampah Menjadi Energi).

Peningkatkan kesejahteraan petani melalui intensifikasi.

Sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Zona Rimba sangat krusial. Intensifikasi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi petani tidak memicu deforestasi lebih lanjut. Dengan produktivitas yang tinggi di lahan yang sempit, tekanan terhadap zona rimba untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan akan berkurang (Saputra, 2023).

Capaian : Telah tebitnya penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Penerbitan STDB

Indikator Keberhasilan:

- a. Peningkatan produktivitas melalui replanting (peremajaan) dan penerapan good agricultural practices (GAP).
- b. Hilirisasi dan kelembagaan petani melalui konsolidasi dan sertifikasi berkelanjutan (ISPO/RSPO).

Tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

Capaian: Terbentuknya perjanjian kerja sama resmi (PKS) antara kelompok tani/masyarakat dengan sektor swasta (perusahaan berbasis perkebunan kelapa sawit).

Indikator Keberhasilan:

- a. Kemitraan: Integrasi skema CSR perusahaan sawit di Riau dan Jambi dengan model bisnis sirkular masyarakat.

- b. Sertifikasi dan Regulasi: Penerapan standar tata kelola yang mengacu pada regulasi lingkungan nasional dan sertifikasi berkelanjutan.
- c. Monitoring: Penggunaan sistem pelaporan rutin berbasis data riset dari lembaga akademis (UNAND, UNJA, UNRI).

KESIMPULAN

Hasil pengabdian berupa implementasi strategi Sustainable Production and Consumption (SPC) di kawasan Koridor RIMBA telah menjadi model pembangunan perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat secara berkelanjutan dalam menyatukan pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi dilakukan terhadap empat pilar utama yaitu penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit, peningkatan kesejahteraan, efisiensi penggunaan sumberdaya dan meminimalisir penggunaan limbah menuju pembangunan rendah karbon

REFERENSI

- Atharinafi, Z., & Wijaya, N. (2021). Land use change and its impacts on surface runoff in rural areas of the upper citarum watershed (case study: Cirasea subwatershed). *Journal of Regional and City Planning*, 32(1), 36–55. <https://doi.org/10.5614/jpww.2021.32.1.3>
- Junaidi, R. (2015). Parameter Hidrologi Dan Hidrogeologis Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Ruang. *EMARA -Indonesian Journal of Architecture*, 1, 15–23.
- Kustiawan, I. (1997). Permasalahan Konversi Lahan Pertanian dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Wilayah: Studi Kasus Wilayah Pantura Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(1), 49–60.
- Luthfi, A., Wijaya, A., Sosiologi, J., & Antropologi, D. (2011). Persepsi Masyarakat Sekaran Tentang Konservasi Lingkungan. In *Komunitas* (Vol. 3, Number 1). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>
- Mustofa, R., Bakce, R., & Suwondo, D. (2025). *Willingness To Pay (WTP) Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Terhadap Jasa Ekosistem di Provinsi Riau*. 23, 544–554. <https://doi.org/10.14710/jil.23.2.544-554>
- Mustofa, R., Syahza, A., Manurung, G. M. E., Nasrul, B., Afrino, R., & Siallagan, E. J. (2024). Land tenure conflicts in forest areas: obstacles to rejuvenation of small-scale oil palm plantations in Indonesia. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0216>
- Nugraha, R., Cut Risya Varlitya, M., Loso Judijanto, Ms., Saputra Adiwijaya, Ms., & Irma Suryahani, Ms. (2024). *Green Economy* (1st ed.). www.buku.sonpedia.com
- Pemerintah Provinsi Riau. (2018). Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018. In Provinsi Riau (Ed.), *Rencana Tata Ruang Wilyah Provinsi Riau* (Revisi, p. 280). Pemerintah Provinsi Riau.
- Salim, E. (2010). Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. In *Pembangunan Berkelanjutan* (Number September 2010). http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo/2006to2010/Emil_buku.pdf
- Wahyu Firdaus, M., Hayati, M., Rizal Dwi Adi Nugroho, T., Studi Magister Ekonomi Pertanian, P., Pertanian, F., & Brawijaya, U. (2023). Pertanian Indonesia: Sebuah Review The Role And Contribution of Young Generation On Indonesian Agricultural Development : A Review. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 7(4), 1521–1527. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.04.28>
- Widodo, S. (2017). A critical review of indonesia’s agrarian reform policy. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>